

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang bertujuan menyediakan atau memproduksi barang-barang dan jasa sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat, tujuan ini yang membedakan sektor publik dan sektor swasta. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Organisasi sektor publik yang sering diidentikkan dengan pemerintahan atau badan usaha yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, keamanan, kebebasan beragama dan beberapa hal lainnya.

Organisasi di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi sektor publik tersebut, baik pusat ataupun daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo,2010).

Pemerintah adalah entitas pelapor (reporting entity) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban karena: (a) Pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan; (b) Penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat; dan (c) Terdapat pemisahan antara manajemen dan kepemilikan sumber-sumber tersebut (Partono,2000)

Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2004).

Dengan adanya reformasi atau pembaharuan di dalam sistem pertanggungjawaban keuangan daerah, sistem lama yang selama ini digunakan oleh Pemda yaitu Manual Administasi Keuangan Daerah (MAKUDA) yang diterapkan sejak 1981 sudah tidak dapat lagi mendukung kebutuhan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Selain itu,keinginan masyarakat juga didorong keinginan untuk mencapai good

government governance yang dapat mewujudkan tuntutan akan tingkat transparansi dan akuntabilitas publik yang baik.

Belum tertibnya pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh masih terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain, unsur kualitas sumber daya manusia berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumber daya manusia pada suatu instansi memiliki nilai tinggi yang disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan.

Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas atau catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan tersebut. (PSAK No. 1 Tahun 2015:1). Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan (PSAK No.1 Tahun 2015:3). Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu.

Laporan keuangan adalah catatan keuangan suatu perusahaan atau instansi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan atau instansi tersebut (SAK, 2010). Oleh karena itu, informasi yang terdapat didalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus

bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Laporan Keuangan Pemerintah memiliki fungsi salah satunya adalah merupakan gambaran kondisi suatu pemerintahan dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannya.

Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya, prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dihendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi standar akuntansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang kemudian diperbaharui dengan keluarnya Permendagri No 64 Tahun 2013 yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Berbasis Akrua.

Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi kriteria laporan keuangan yang berkualitas, ditetapkan dalam rangka konseptual akuntansi pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010, yaitu: keandalan, relevan, dapat dibandingkan dan dapat diahahi. Pemenuhan terhadap karakteristik tersebut, sebagai pertanggungjawaban bahwa pemerintah telah mengelola dana publik yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat diartikan bahwa laporan keuangan suatu entitas tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan pernyataan Menolak memberika Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Tuntutan masyarakat semakin meningkat atas pemerintah yang baik. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daeah (SKPD) harus ditingkatkan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan adalah cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dimana laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif.

Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. hal ini yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadi kurangnya pemahaman aparatur satuan kerja perangkat daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar.

Ketidakpahaman aparaturnya pemerintah daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjadikan pendidikan dan pelatihan (Diklat) sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Pasal 10 yang menyebutkan bahwa dalam upaya peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan (Diklat) dalam penjabaran. Pada dasarnya pemerintah daerah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan daerah menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas.

Sistem informasi yang membantu proses pencatatan dan pelaporan anggaran dan keuangannya, membantu proses indentifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dengan dimanfaatkannya teknologi, informasi yang didapatkan diharapkan dapat membantu pihak yang berkepentingan dalam mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah dan mengevaluasinya, sehingga informasi yang didapatkan haruslah sebuah informasi yang berkualitas. Sistem informasi yang dapat diterima dan mampu memenuhi harapan informasi secara tepat waktu (*timely*), akurat (*accurate*), dan dapat dipercaya (*reliable*) (Widjanto,2011).

Saat ini sistem akuntansi yang dimiliki oleh pemerintah daerah rata-rata masih lemah, sistem akuntansi yang handal dan didasarkan atas standar akuntansi

pemerintah akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan secara lebih transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Saat ini perkembangan kualitas laporan keuangan serta akuntabilitas atas LKPD belum mencapai harapan. Hal ini terlihat dari beberapa opini atas LKPD yang diberikan oleh BPK RI yang masih mendapatkan opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat. Hingga saat ini terdapat 31 LKPD yang memperoleh opini TMP yang pada umumnya laporan keuangan tidak dapat diyakini kewajarannya dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang disebabkan oleh pembatasan lingkungan pemeriksaan, kelemahan pengelolaan yang material pada akun aset tetap, kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan non permanen, aset lainnya, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

BPK menemukan 2.156 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yang terdiri atas:

- Sebanyak 941 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
- Sebanyak 813 pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat
- Sebanyak 351 sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai
- Sebanyak 14 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan
- Sebanyak 36 sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai
- Sebanyak 1 kasus lainnya.

Sebuah fenomena yang terjadi di Kota Bandung pada tahun 2010 lalu, diketahui BPK mengeluarkan opini disclaimer atau menolak memberikan pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung tahun 2009. Sedangkan sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 Kota Bandung mendapatkan opini WDP. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh BPK tertulis bahwa Pemkot Bandung menyajikan laporan penyertaan modal tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan.

BPK mengalami kesulitan untuk melakukan prosedur alternatif mengingat Satuan Perangkat Kerja Daerah tidak melakukan pencatatan atas mutasi persediaannya. Jikapun ada pencatatan, hanya dilakukan oleh sebagian SKPD dan antar catatan atas persediaan tersebut tidak saling mendukung sehingga tidak dapat diverifikasi. (Arman Syifa:2016)

Selain itu penyajian aset tetap tidak didukung dengan rincian daftar aset maupun dokumen berupa inventarisasi dan penilaian aset tersebut. Jikapun daftar inventarisasi dimiliki, data tersebut sudah tidak mutakhir dan tidak valid yang disebabkan mutasi barang antar SKPD tidak diikuti dengan mutasi pencatatannya.

Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat menilai, minimnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih menjadi faktor utama yang menjadi titik lemah penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) di Jawa Barat. Menurutnya, saat ini hampir di seluruh Pemda, mulai dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota

di Jawa Barat masih sangat minim SDM yang memiliki latar belakang akuntansi atau auditor. Karena itulah, laporan keuangan masih banyak kekurangannya.

Menanggapi hal tersebut Ridwan Kamil selaku Wali Kota Bandung menyebutkan masalah pendapatan aset masih menjadi kendala Pemerintah Kota Bandung untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Banyak aset milik Pemerintah Kota Bandung yang masih belum terdata. Ridwan Kamil menuturkan sebagai kota peninggalan Belanda ini setahun lebih dari 15 kali digugat ke pengadilan untuk urusan aset. Jadi kombinasi aset dari zaman dulu yang sudah dihitung ternyata banyak digugat, itu juga menjadi PR besar bagi Pemerintah Kota Bandung.

Ridwan Kamil mencotohkan, masalah kepemilikan aset yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seperti tidak adanya sertifikat aset yang dikuasai oleh pihak ketiga. Padaahal disisi lain aset ini tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Bandung. Tapi tidak diakui oleh Badan Pemeriksa Keuanga (BPK) karena keberadaannya tidak diyakini. Berikut data penilaian yang diterima oleh Pemerintah Kota Bandung tahun 2013-2017:

Tabel 1.1

Daftar Opini BPK atas LKPD Kota Bandung

Tahun 2013-2017

| Tahun | Opini Badan Pemeriksa Keuangan |
|--------------|---------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------|

| | |
|------|---------------------------------|
| 2013 | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) |
| 2014 | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) |
| 2015 | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) |
| 2016 | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) |
| 2017 | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) |

TABEL 1.1 diatas menunjukkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2012-2017 dengan opini memberikan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Permasalahan yang dihadapi setiap tahunnya dari 2013-2015 selalu sama yaitu terkait pengelolaan aset.

Fenomena lain yang terjadi menyangkut kualitas laporan keuangan yaitu yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dimana Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ditekankan untuk lebih memperhatikan kualitas laporan keuangan meliputi tata kelola laporan keuangan baik, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan khususnya mengenai pengguna Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal itu terkait belum adanya penyelesaian kasus pengelolaan keuangan daerah dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang terjad setiap tahun di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengeucualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2013. Menurut R. Dewi P selaku Kepala Bidang Aset Daerah Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Asli Daerah

Kabupaten Bandung Barat mengemukakan bahwa sampai saat ini ada masalah yang terjadi, masalah pertama yaitu ketidakcocokkan data aset yang dilimpahkan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Ketidakcocokkan ini umumnya soal adanya dana yang tercatat ganda, atau adanya daftar aset yang tercatat, namun sebenarnya tidak ada setelah ditelusuri ke lapangan. Sehingga mengenai total keseluruhan aset yang ada di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, terutama nominalnya yang masih belum bisa memadai, masalah ketiga yaitu penyajian penyertaan modal pemerintah yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Berikut data penilaian yang diterima oleh Kabupaten Bandung Barat 2009-2016:

Tabel 1.2

Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kabupaten Bandung Barat

Tahun 2009-2016

| Tahun | Opini Badan Pemeriksa Keuangan |
|-------|-------------------------------------|
| 2009 | Tidak Memberi Pendapat (Disclaimer) |
| 2010 | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) |
| 2011 | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) |
| 2012 | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) |
| 2013 | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) |
| 2014 | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) |
| 2015 | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) |
| 2016 | Wajar Dengan Pengecualian (WDP) |

Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa Badan Pereriksa Keuangan (BPKO memberikan opini terhadap Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2009 dengan opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*), dan pada tahun 2010-2016 memberikan perbaikan yang cukup baik yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pada tahun 2014 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Barat kembali mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP. Menurut H.Abubakar selaku Bupati Bandung Barat, opini tersebut diraih kembali karena masih ada beberapa pekerjaan yang harus lebih ditingkatkan lagi. Terutama menyangkut penata usahaan aset di beberapa SKPD yang hingga kini masih belum ada titik temunya. Menyadari masih adanya kelemahan dalam pemerintah yang dipimpinnya Abubakar menegaskan, akan segera melakukan konsolidasi dan memerintahkan dengan tegas seluruh jajarannya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama ini secepat mungkin. Beliau berharap kedepannya Kabupaten Bandung Barat (KBB) bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (H.Abubakar)

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pun diraih kembali pada tahun 2015 dan 2016. Aa Umbara Sutisna menilai bahwa pengelolaan aset permasalahan utama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam meraih opini

Wajar Dengan Pengecualian (WDP), selama delapan tahun lebih persoalan aset pelimpahan dari Kabupaten Bandung kepada Kabupaten Bandung Barat tak kunjung dapat diselesaikan. Aa menilai, lemahnya kinerja SKPD selama ini terutama menyangkut persoalan aset menjadi salah satu indikator gagalnya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meraih WTP dari BPK RI. Aset yang tersertifikasi masih sedikit dibandingkan dengan aset yang belum tersertifikasi. Padahal Aa mengakui persoalan aset ini sudah bergulir selama lebih dari 9 tahun lamanya namun penyelesaiannya masih belum tampak begitu signifikan.

(Aa Umbara:2016)

Kesimpulannya selama ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selalu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masalah setiap tahunnya sama yaitu terkait dengan engelolaan aset yang tak kunjung dapat diselesaikan.

Telah banyak penelitian mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Harmoni (2016) mengenai “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD di Kabupaten Kepulauan Anambas)” dari kesimpulan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Komalasari (2016) mengenai “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada DPKAD Kabupaten Subang)” dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan AS Syifa Nurillah (2014) mengenai “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada SKPD Kota Depok)” dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh, penerapan sistem akuntansi, teknologi informasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Indriastari (2008) mengenai “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Organ Ilir)” yang menemukan bukti empiris kapasitas sumber daya manusia di Kabupaten Organ Ilir tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan penggunaan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif.

Adanya perbedaan hasil penelitian yang diperoleh tersebut, membuat penulis semakin ingin untuk melakukan penelitian ulang terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan replikalisasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Devi Roviyantie (2011) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survey pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya)”.

Penulis menggunakan penelitian terdahulu dimaksudkan untuk dijadikan bahan pertimbangan adanya beberapa persamaan dan perbedaan di dalam penelitian. Di dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang diteliti, yaitu; variabel independen (bebas) yaitu kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah dan untuk variabel dependen kualitas laporan keuangan. Perbedaan yang dilakukan terhadap penelitian terdahulu (Devi Roviyantie, 2011) yaitu pada tempat penelitian dimana penulis melakukan penelitian pada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung.

Berdasarkan latarbelakang yang diuraikan penulis di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi empiris pada unit SKPD Pemerintah Kota Bandung)”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka

dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunan penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bandung masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan dari BPK yang disebabkan oleh pengelolaan aset yang masih belum baik.
2. Minimnya kompetensi sumber daya manusia pada pemerintah Kota Bandung membuat kualitas laporan keuangan masih belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. BPK menemukan 2.156 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yang terdiri proses penyusunan tidak sesuai dengan standar, laporan keuangan belum dilakukan atau tidak akurat, sistem informasi tidak memadai, entitas terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat Dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia pada Pemerintah Kota Bandung
2. Bagaimana penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung
3. Bagaimana kualitas laporan keuangan daerah Pemerintah Kota Bandung
4. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah
5. Seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap laporan keuangan daerah
6. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah secara simultan

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui kompetensi sumber daya manusia pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan sistem akuntansi keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui kualitas laporan keuangan daerah Pemerintah Kota Bandung

4. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah Pemerintah Kota Bandung.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah Pemerintah Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan di bidang akuntansi pada umumnya, dan akuntansi pemerintah Indonesia pada khususnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis, mengenai partisipasi, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berguna dan pertimbangan yang bermanfaat bagi pihak instansi terkait untuk lebih mengetahui seberapa besar pengaruh partisipasi, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung

3. Bagi Pembaca

Bagi pembaca pada umumnya diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan dan juga sumber pemikiran yang bermanfaat dalam membangun bangsa yang lebih baik lagi untuk kedepannya melalui ilmu akuntansi.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Bandung dan peneliti mulai penelitian pada November 2017.